KATALOG : 9302020.3502

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN PONOROGO MENURUT PENGELUARAN 2016-2020

https://ponorogokab.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PONOROGO

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN PONOROGO MENURUT PENGELUARAN 2016-2020

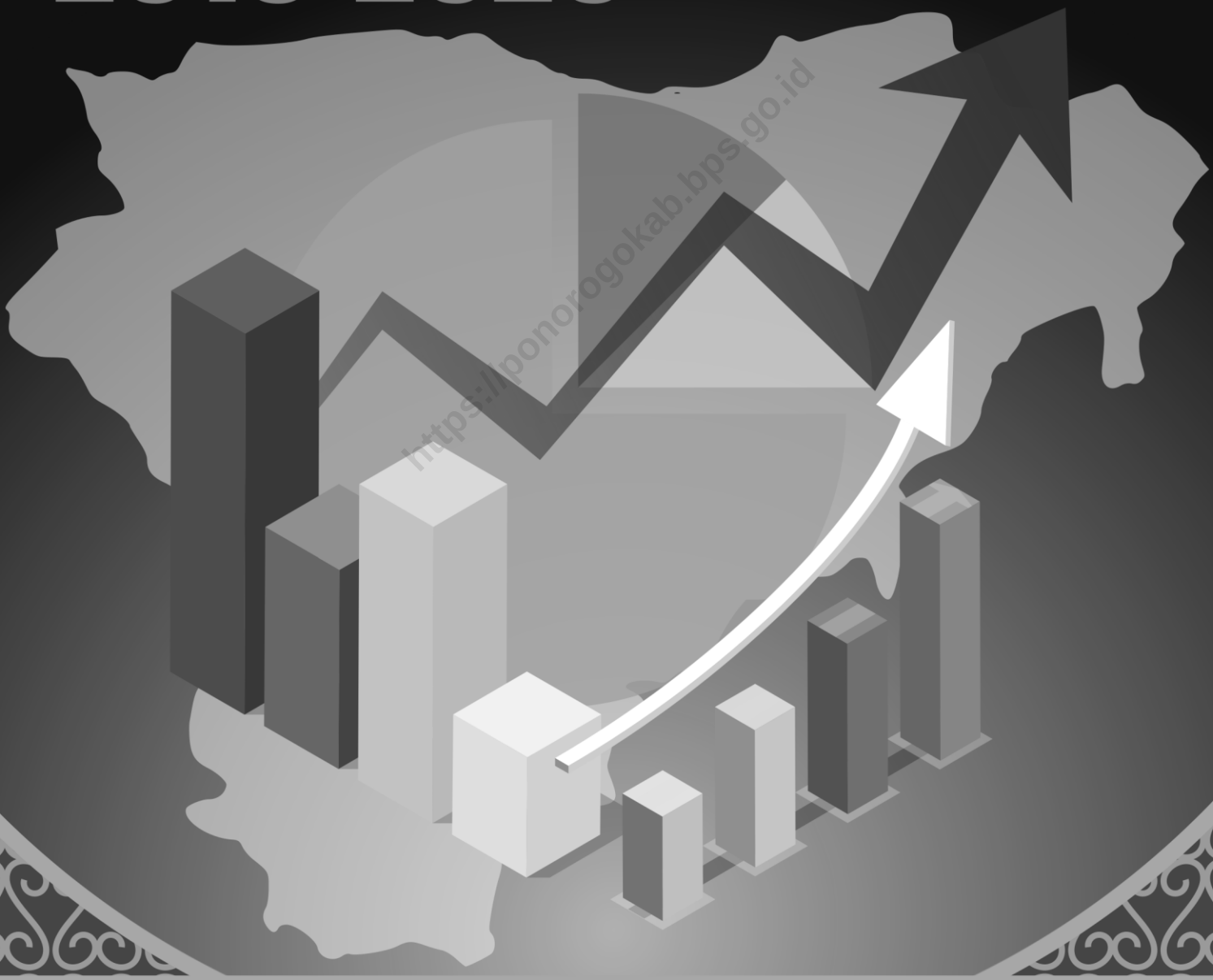

https://ponorogokab.bps.go.id

https://ponorogokab.bps.go.id

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN PONOROGO
MENURUT PENGELUARAN 2016 – 2020

Katalog : **9302020.3502**

Nomor Publikasi : **35020.2104**

Ukuran Buku : **21 x 29,7 cm**

Jumlah Halaman : **xiv + 68 halaman**

Naskah : **Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo**

Penyunting : **Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo**

Desain kover : **Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo**

Diterbitkan Oleh : **@Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo**

Dicetak Oleh : **CV. Azka Putra Pratama**

https://ponorogokab.bps.go.id

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab Umum :
Ir. Siswi Harini, M.Si.

Penyunting :
Muhlison Fatawi, S.ST., M.Si.

Penulis :
Wahyu Tri Mulatsih, S.ST.

Pengolah Data :
Wahyu Tri Mulatsih, S.ST.

Gambar Kulit :
Wahyu Tri Mulatsih, S.ST.

https://konorogokab.bps.go.id

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Publikasi ini secara khusus membahas PDRB menurut pengeluaran/permintaan akhir, yang dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor dan Impor. Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya mengunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

https://ponorogokab.bps.go.id

Ponorogo, April 2021

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
Kabupaten Ponorogo,

Ir. Siswi Harini, M.Si.

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar v

Daftar Isi vi

Daftar Tabel viii

Daftar Grafik x

Daftar Lampiran xi

Infografis xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)..... 3

1.2. Perubahan Tahun Dasar PDRB 6

BAB II METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA 11

2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT) 13

2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumahtangga (PK-LNPRT) 15

2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P) 16

2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 19

2.5 Perubahan Inventori (PI) 21

2.6 Ekspor - Impor 24

BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN PONOROGO MENURUT PDRB PENGELUARAN 2016-2020 25

3.1 Perkembangan PDRB Pengeluaran 27

3.2 Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran 36

3.2.1 Konsumsi Akhir Rumahtangga 36

3.2.2 Konsumsi Akhir LNPRT 41

3.2.3 Konsumsi Akhir Pemerintah 42

3.2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto 45

3.2.5 Perubahan Inventori 47

3.2.6 Net Ekspor Barang dan Jasa 49

https://ponorogokab.bps.go.id

BAB IV PERKEMBANGAN AGREGAT PRDB PENGELUARAN KABUPATEN PONOROGO 2016-2020 ……..... 51
4.1 PDRB (Nominal) ……..... 53
4.2 Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB 54
4.3 *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) ……. ... 55

BAB V PENUTUP ……... 57

LAMPIRAN …….. 61

https://ponorogokab.bps.go.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Ponorogo Menurut Pengeluaran, 2016-2020	28
Tabel 2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Ponorogo Menurut Pengeluaran, 2016-2020	29
Tabel 3	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Ponorogo Menurut Pengeluaran, 2016-2020	31
Tabel 4	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Ponorogo Menurut Pengeluaran, 2016-2020	33
Tabel 5	Pertumbuhan Indeks Implisit PDRB Kabupaten Ponorogo Menurut Pengeluaran, 2016-2020	34
Tabel 6	Sumber Pertumbuhan PDRB Kabupaten Ponorogo Menurut Pengeluaran, 2016-2020	35
Tabel 7	Perkembangan Komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Ponorogo, 2016-2020	37
Tabel 8	Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Ponorogo, 2016-2020	38
Tabel 9	Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Ponorogo, 2016-2020	39
Tabel 10	Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Ponorogo, 2016-2020	40
Tabel 11	Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kabupaten Ponorogo, 2016-2020	41
Tabel 12	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Ponorogo, 2016-2020	43
Tabel 13	Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Ponorogo, 2016-2020	46
Tabel 14	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Ponorogo, 2016-2020	48

https://ponorogokab.bps.go.id

Tabel 15 Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Ponorogo, 2016-2020 50
Tabel 16 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Ponorogo, 2016-2020 …..……..…….…… 53
Tabel 17 Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB Kabupaten Ponorogo, 2016-2020 54
Tabel 18 *Incremental Capital Output Ratio* Kabupaten Ponorogo, 2016-2020 ….... 56

https://ponorogokab.bps.go.id

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Ponorogo Menurut Pengeluaran, 2016-2020	28
Grafik 2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Ponorogo Menurut Pengeluaran, 2016-2020	30
Grafik 3	Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Ponorogo Menurut Pengeluaran, 2016-2020 (Miliar Rupiah)	30
Grafik 4	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Ponorogo Menurut Pengeluaran, 2016-2020	32
Grafik 5	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Ponorogo Menurut Pengeluaran, 2016-2020	33

https://ponorogokab.bps.go.id

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 1	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	63
Tabel 2	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020 ……	64
Tabel 3	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020 …….....	65
Tabel 4	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	66
Tabel 5	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	67
Tabel 6	Perubahan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	68

https://ponorogokab.bps.go.id

https://ponorogokab.bps.go.id

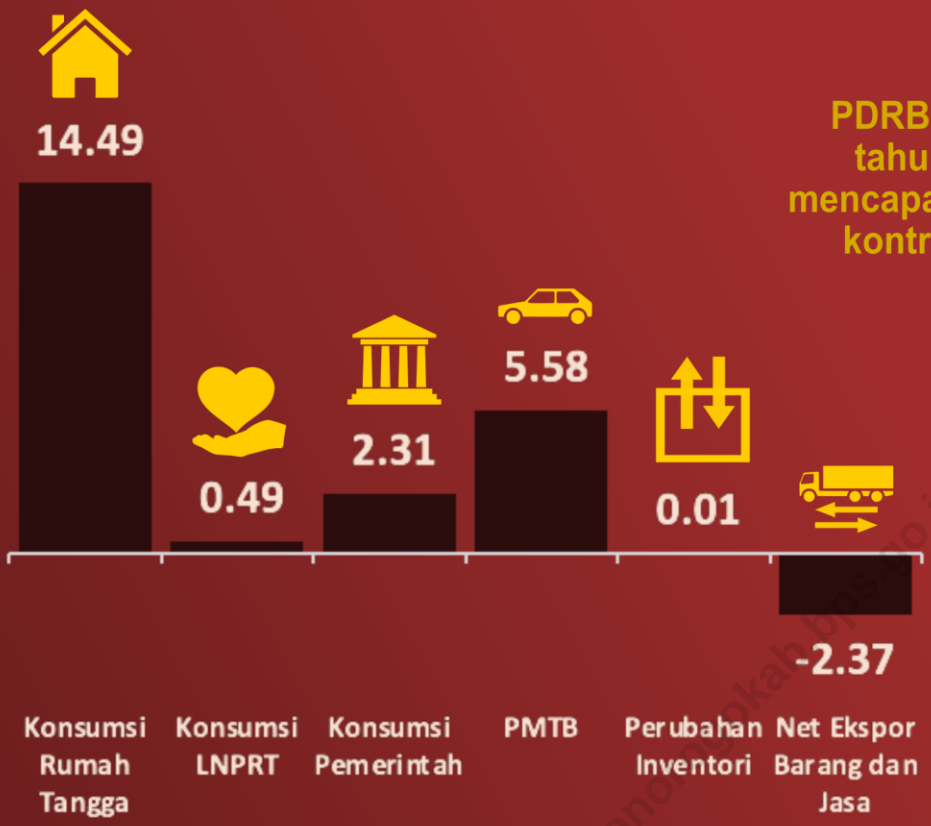

PDRB ADHB Kabupaten Ponorogo tahun 2020 menurut pengeluaran mencapai 20.51 triliun rupiah dengan kontribusi terbesar (70.64 persen) dari komponen pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 14.49 triliun rupiah

https://ponorogokab.bps.go.id

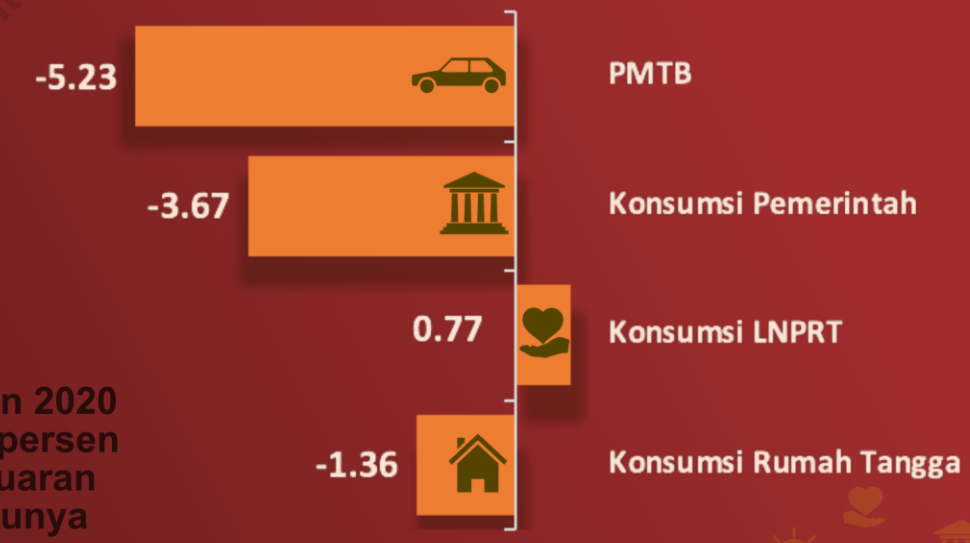

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo tahun 2020 mengalami kontraksi 0.90 persen dengan komponen pengeluaran Konsumsi LNPRT satu-satunya yang tumbuh positif

https://ponorogokab.bps.go.id

1 PENDAHULUAN

https://ponorogokab.bps.go.id

https://ponorogokab.bps.go.id

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil "akhir" dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel pengeluaran konsumsi akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)[1]. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side)* dan sisi permintaan (*demand side)* barang dan jasa.

Secara konsep[2] penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

https://ponorogokab.bps.go.id

[1] *Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung "neto" (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)*
[2] *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa *(output)* yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi "akhir" oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk "permintaan akhir". Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumahtangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

https://ponorogokab.bps.go.id

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical descrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana "pendapatan" (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat[3], yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

3. - Yang dimaksud adalah rumahtangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik
- Disebut sebagai pendekatan "riil"
- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai **"output akhir (*final output*)"**. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb :

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (*Income*)	= PDRB Produksi
C (*Consumption*)	= Konsumsi akhir
GFCF (*Gross Fixed Capital Formation*)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

https://ponorogokab.bps.go.id

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan "identik" dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai "ekspor neto".

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan "riil", serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

1.2 PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts* (*SNA*) adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables* (SUT) Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

https://ponorogokab.bps.go.id

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomi wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
b. Meningkatkan kualitas PDRB;
c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

https://ponorogokab.bps.go.id

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun[4];
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

[4] *SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"*

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan

  a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). *CBR* merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
  b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). *MWS* merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
  c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
  d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
  e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
  f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). *CSD* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases,* yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
  g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). *ELA* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.

https://ponorogokab.bps.go.id

h. Pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- Metodologi

  Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). *FISIM* dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge* (*IBSC*).

- Valuasi

  Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- Klasifikasi

  Klasifikasi yang digunakan adalah *International Standard Industrial Classification* (ISIC rev.4) dan *Central Product Classification* (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

https://ponorogokab.bps.go.id

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
4. Perubahan Inventori	5. Perubahan Inventori
5. Ekspor	6. Ekspor
6. Impor	7. Impor

https://ponorogokab.bps.go.id

2 METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA

https://ponorogokab.bps.go.id

https://ponorogokab.bps.go.id

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAHTANGGA (PK-RT)

i. Pendahuluan

Sektor rumahtangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran[5]. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga untuk tujuan konsumsi. Rumahtangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

https://ponorogokab.bps.go.id

iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

[5] *Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai ekspornya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumahtangganya relatif lebih rendah*

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perelngkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumahtangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

https://ponorogokab.bps.go.id

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

2.2 *PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAHTANGGA (PK-LNPRT)*

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumahtangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumahtangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

https://ponorogokab.bps.go.id

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain.
c. Penyusutan.
d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Sumber Data

a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumahtangga (SK-LNP), BPS
b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
c. Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS
d. Indeks Harga Konsumen, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

https://ponorogokab.bps.go.id

2.3 *PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)*

i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumahtangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidentil dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam parktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

https://ponorogokab.bps.go.id

iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota; b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementrian Keuangan dan BPPKAD
b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementrian Keuangan dan BPPKAD
e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metoda:

PK-P atas dasar harga Berlaku = Output –
Penjualan barang dan jasa +
Social transfer in kind purchased market production +
Output Bank Indonesia

https://ponorogokab.bps.go.id

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

1. PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-*deflate* PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakaan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Social Transfer in kind	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources*/CBR). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

https://ponorogokab.bps.go.id

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah ”bruto” mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii Cakupan

PMTB mencakup :

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);

2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

iv Sumber Data

a. Output industri konstruksi, BPS
b. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
c. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
d. Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
e. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
f. Data Eksplorasi Mineral, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral
g. Statistik Peternakan, Dinas Pertanian.

https://ponorogokab.bps.go.id

v Metoda estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

✓ Metoda Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM +Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-*deflate* PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

- ✓ Metoda Tidak Langsung :

  Pendekatan Supply : PMTB atas dasar harga Berlaku = Total Supply Barang x Rasio PMTB

  Pendekatan Ekstrapolasi : PMTB atas dasar harga Konstan (t) = PMTB atas dasar hargak (t-1) x Indeks Produksi (t)

2.5 *PERUBAHAN INVENTORI (PI)*

i Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

https://ponorogokab.bps.go.id

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress)*, serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumahtangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
f. Ternak untuk tujuan dipotong;
g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

https://ponorogokab.bps.go.id

iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah:

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei;
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS;
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS;
4. Data Inventori Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;
6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
8. Data persediaan beras, gabah, gula Bulog; dan data ternak, Dinas Pertanian.

v Metoda Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metoda deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

https://ponorogokab.bps.go.id

a. Metoda Revaluasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

PI atas dasar harga Berlaku = Volume inventori (t) – Volume inventori (t-1)) x Harga per unit

PI atas dasar harga Konstan = PI atas dasar harga Berlaku / IHPB

b. Metoda Deflasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

PI atas dasar harga Konstan = Inventori (t) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t) - Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t-1)

PI atas dasar harga Berlaku = PI atas dasar harga Konstan x IHPB rata-rata (t)

2.6 EKSPOR - IMPOR

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestiknya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

https://ponorogokab.bps.go.id

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefiniskan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

iii Cakupan

Ekspor-Impor ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

a. Ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota
b. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

iv Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasinya tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha.

3 TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN PONOROGO MENURUT PDRB PENGELUARAN 2016-2020

https://ponorogokab.bps.go.id

https://ponorogokab.bps.go.id

3.1 PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

Sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts* (*SNA*) yang baru, SNA 2008. Ke dua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

Setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Ponorogo digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Kelebihan produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh Ponorogo akan diekspor ke daerah lain di luar Ponorogo, sedangkan jika permintaan domestik tinggi sementara produksi domestik tidak mencukupi maka akan mendatangkan (impor) barang dan jasa dari daerah lain di luar Ponorogo.

https://ponorogokab.bps.go.id

Kondisi perekonomian Kabupaten Ponorogo pada periode 2016 - 2019 fluktuatif namun relatif stabil di kisaran 5% dan pada tahun 2020 terkontraksi sebesar 0,90%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo pada periode 2016-2019 yakni sebesar 5,29% (2016); 5,10% (2017); 5,31% (2018); 5,01% (2019) dan -0,90% (2020). Kontraksi ekonomi tersebut dikarenakan oleh adanya pandemik *Covid-19* yang tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Dari sisi produksi, 10 lapangan usaha mencatat kontraksi, sedangakan 7 lapangan usaha mencatat pertumbuhan. Dari sisi permintaan akhir, kontraksi ekonomi Kabupaten Ponorogo sangat dipengaruhi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga (PK-RT) yang juga mengalami kontraksi, yang menyumbang lebih dari separuh total PDRB.

Pada periode tahun 2016 - 2020 PDRB Kabupaten Ponorogo atas dasar harga Berlaku meningkat cukup signifikan, yakni dari 16.4196,19 miliar Rupiah (2016) menjadi 17.690,42 miliar Rupiah (2017); 19.174,23 miliar Rupiah (2018); 20.483,75 miliar Rupiah (2019) dan 20.513,38 miliar Rupiah (2020). Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Ponorogo pada periode 2016-2020 dapat dilihat dari tabel 1 dan grafik 1 berikut ini:

Tabel 1. PDRB atas dasar harga Berlaku Kabupaten Ponorogo Menurut Pengeluaran 2016 - 2020

(Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	11.684,83	12.569,84	13.624,05	14.612,76	14.489,73
2. Konsumsi LNPRT	379,95	406,48	446,13	485,28	494,71
3. Konsumsi Pemerintah	1.864,48	1.992,98	2.169,28	2.338,22	2.314,68
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.488,41	4.972,33	5.422,88	5.850,06	5.580,25
5. Perubahan Inventori	11,12	10,79	11,76	12,04	6,30
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	(2.009,60)	(2.262,00)	(2.492,60)	(2.802,48)	(2.372,30)
PDRB	**16.419,19**	**17.690,42**	**19.174,23**	**20.483,75**	**20.513,38**

*Keterangan : * Angka sementara* ***Angka sangat sementara*

https://ponorogokab.bps.go.id

Grafik 1. PDRB atas dasar harga Berlaku Kabupaten Ponorogo Menurut Pengeluaran, 2016 – 2020

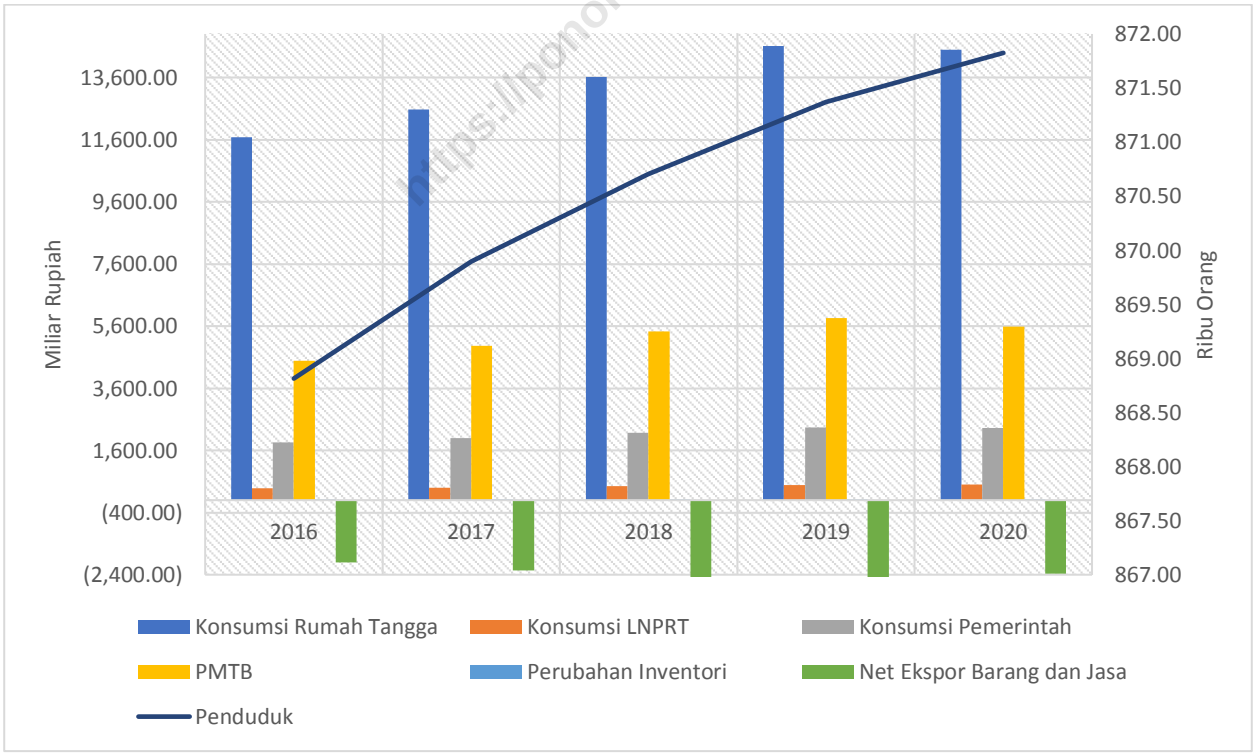

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Ponorogo pada periode 2016-2020 dapat dilihat dari tabel 2 dan grafik 2 berikut ini:

Tabel 2. PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Ponorogo Menurut Pengeluaran 2016 - 2020

(Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	9.022,93	9.419,67	9.851,69	10.304,91	10.164,97
2 Konsumsi LNPRT	277,01	285,38	303,62	323,62	326,11
3 Konsumsi Pemerintah	1.262,24	1.288,89	1.333,40	1.390,31	1.339,24
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.316,36	3.544,74	3.761,10	3.943,50	3.737,42
5 Perubahan Inventori	7,54	7,27	7,31	7,35	3,83
6 Net Ekspor Barang dan Jasa	(1.580,43)	(1.612,50)	(1.641,88)	(1.672,58)	(1.402,95)
PDRB	**12.305,65**	**12.933,45**	**13.615,23**	**14.297,10**	**14.168,62**

*Keterangan : * Angka sementara ** Angka sangat sementara*

https://ponorogokab.bps.go.id

Dari tabel 2, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Konstan di Kabupaten Ponorogo terus meningkat dari 12.305,65 miliar Rupiah (2016) menjadi 12.933,45 miliar Rupiah (2017); 13.615,23 miliar Rupiah (2018); 14.297,10 miliar Rupiah (2019) dan 14.168,62 miliar Rupiah (2020). Sedangkan dari grafik 2, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ponorogo berfluktuasi meski masih pada kisaran 5 persen di tahun 2016-2019 yaitu 5,29 persen (2016), melambat menjadi 5,10 persen (2017), kemudian tumbuh cepat 5,31 persen (2018), kembali melambat menjadi 5,01 persen (2019) dan terkontraksi sebesar 0,90 persen di tahun 2020 karena pandemik *Covid-19*.

Grafik 2. PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Ponorogo Menurut Pengeluaran 2016 – 2020

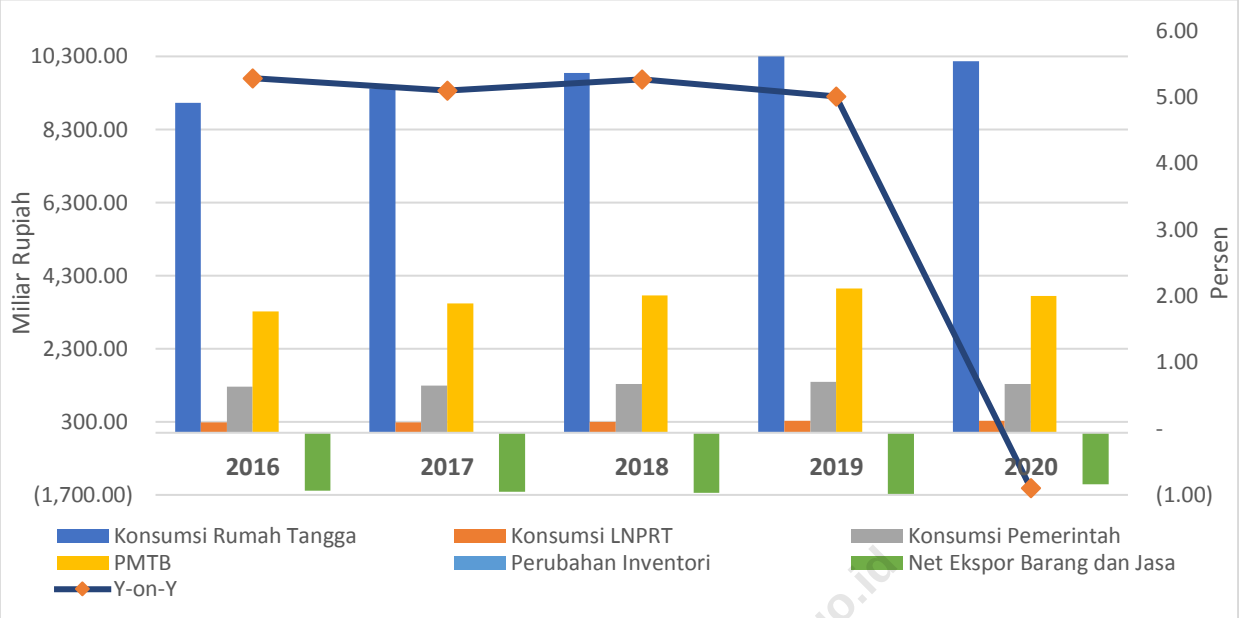

https://ponorogokab.bps.go.id

Grafik 3. Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Ponorogo Menurut Pengeluaran, 2016-2020 (Miliar Rupiah)

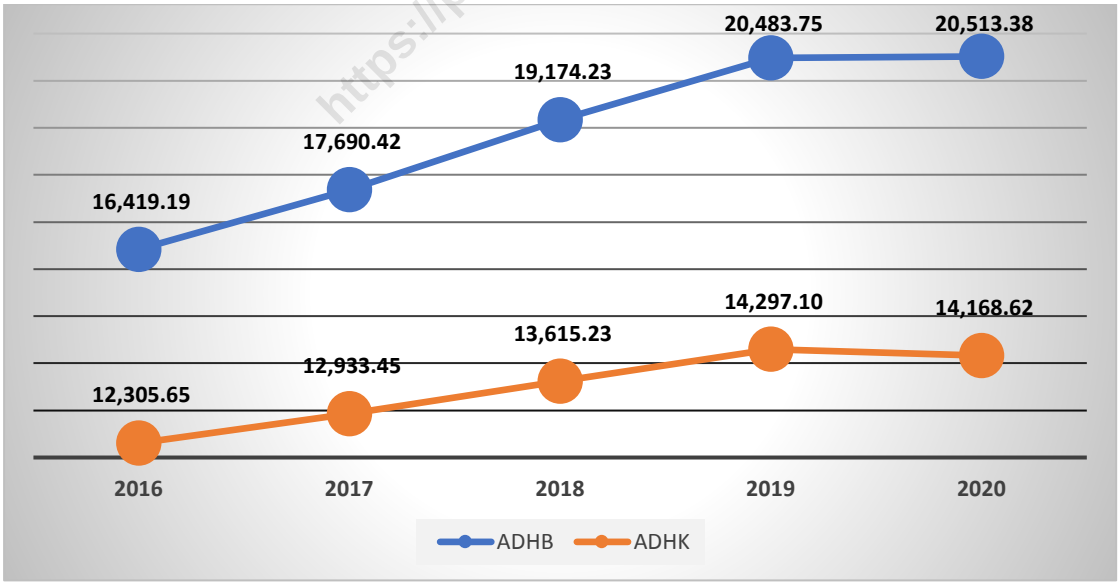

Dari grafik 3, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB atas dasar harga konstan, pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan. Sama halnya PDRB atas dasar harga berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga konstan juga menunjukkan peningkatan.

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Tabel 3. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Kabupaten Ponorogo Menurut Pengeluaran, 2016 - 2020

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	71,17	71,05	71,05	71,34	70,64
2. Konsumsi LNPRT	2,31	2,30	2,33	2,37	2,41
3. Konsumsi Pemerintah	11,36	11,27	11,31	11,42	11,28
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	27,34	28,11	28,28	28,56	27,20
5. Perubahan Inventori	0,07	0,06	0,06	0,06	0,03
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	(12,24)	(12,79)	(13,04)	(13,74)	(11,56)
PDRB	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

*Keterangan : * Angka sementara ** Angka sangat sementara*

https://ponorogokab.bps.go.id

Dari tabel 3 terlihat bahwa selama periode 2016-2020, PDRB Kabupaten Ponorogo sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT). Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mepunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 27 hingga 28 persen. Sementara komponen net ekspor barang dan jasa berkontribusi sekitar minus 11 sampai dengan minus 13 persen, yang berarti kontribusi impor masih jauh lebih tinggi dibandingkan ekspor. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor).

Grafik 4. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Kabupaten Ponorogo Menurut Pengeluaran, 2016 – 2020

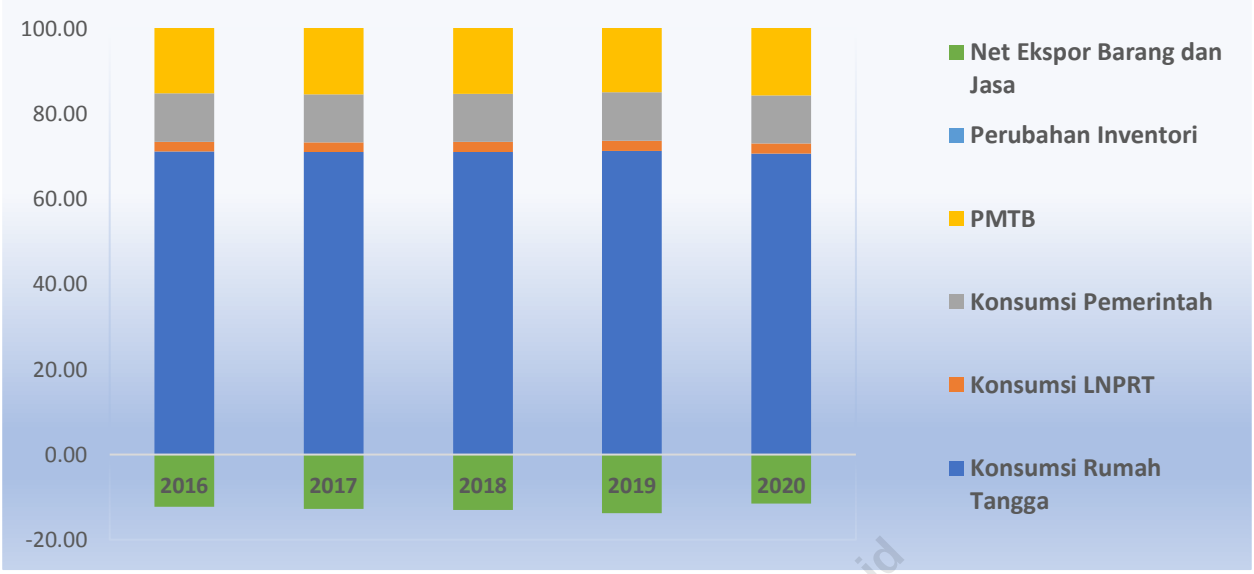

https://ponorogokab.bps.go.id

Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada kisaran 11 persen dan cenderung berfluktuatif. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam penyerapan PDRB tidak terlalu besar. Demikian pula dengan konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT) kontribusinya lebih kecil dibanding komponen konsumsi pemerintah (PK-P) yaitu sekitar 2 persen.

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari tabel 4, selama periode tahun 2016 - 2017 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo mengalami perlambatan, yakni sebesar 5,29 persen (2016); dan 5,10 persen(2017). Kemudian mengalami percepatan pada tahun 2018 yakni 5,27 persen, namun kembali melambat pada tahun 2019 sebesar 5,01 persen. Pada tahun 2020 terjadi pandemik *Covid-19* yang menyebabkan perekonomian secara global mengalami kontraksi, demikian juga dengan perekoniman Kabupaten Ponorogo yang mengalami kontraksi sebesar 0,90 persen. Pada grafik 5 akan terlihat pertumbuhan masing-masing komponen PDRB selama periode tahun yang sama.

Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Ponorogo Menurut Pengeluaran, 2016 - 2020

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,33	4,40	4,59	4,60	-1,36
2. Konsumsi LNPRT	1,18	3,02	6,39	6,59	0,77
3. Konsumsi Pemerintah	-7,07	2,11	3,45	4,27	-3,67
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,49	6,89	6,10	4,85	-5,23
PDRB	**5,29**	**5,10**	**5,27**	**5,01**	**-0,90**

*Keterangan : * sementara ** sangat sementara*

https://ponorogokab.bps.go.id

Grafik 5. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Ponorogo Menurut Pengeluaran, 2016 – 2020

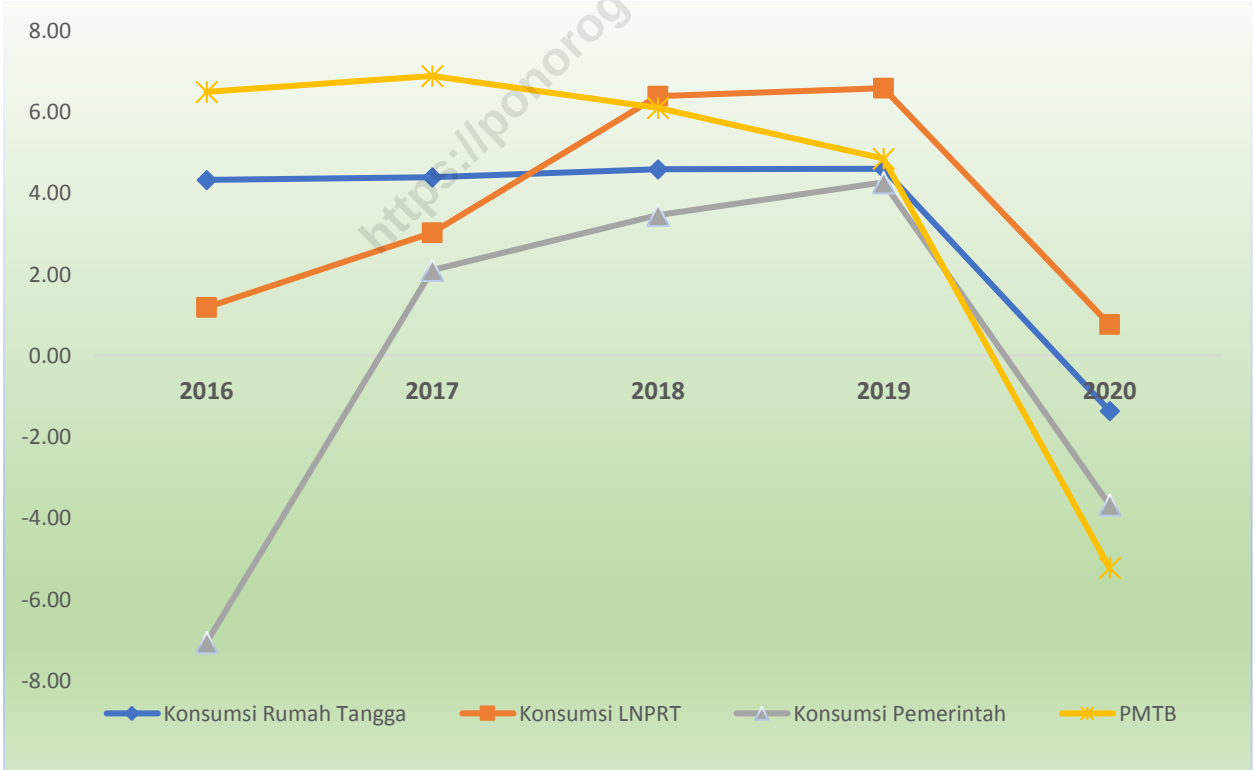

Indeks implisit[6] PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen (rumahtangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan) akhir barang dan jasa, baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun ekspor/impor. Dari tabel 5 akan terlihat tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2016 – 2020, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen.

Tabel 5. Pertumbuhan Indeks Implisit PDRB Kabupaten Ponorogo Menurut Pengeluaran, 2016 - 2020

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,01	3,04	3,63	2,54	0,52
2. Konsumsi LNPRT	3,70	3,84	3,16	2,06	1,17
3. Konsumsi Pemerintah	5,30	4,68	5,21	3,38	2,77
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,46	3,64	2,79	2,89	0,65
PDRB	**4,55**	**2,51**	**2,96**	**1,73**	**1,05**

*Keterangan : * sementara ** sangat sementara*

https://ponorogokab.bps.go.id

Selain pertumbuhan masing-masing komponen dapat dicermati pula sumber pendorong pertumbuhan terhadap total PDRB per komponen. Seperti terlihat pada tabel 6, sumber pertumbuhan terbesar PDRB Kabupaten Ponorogo selama tahun 2016-2019 dipicu oleh pertumbuhan pada komponen konsumsi rumah tangga yakni 3,21 persen (2016); 3,22 persen (2017); 3,34 persen (2018); 3,33 persen (2019). Sedangkan untuk tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 0,90 persen. Hal ini cukup dimaklumi karena kontribusi komponen pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga yang lebih dari separuh total PDRB Kabupaten Ponorogo sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan secara total. Sedikit saja pergeseran pertumbuhan komponen ini mampu menggoyang pertumbuhan total PDRB.

[6] *Indeks perkembangan*

Tabel 6. Sumber Pertumbuhan PDRB Kabupaten Ponorogo Menurut Pengeluaran 2016-2020

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3,21	3,22	3,34	3,33	-0,98
2. Konsumsi LNPRT	0,03	0,07	0,14	0,15	0,02
3. Konsumsi Pemerintah	-0,82	0,22	0,34	0,42	-0,36
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,73	1,86	1,67	1,34	-1,44
PDRB	**5,29**	**5,10**	**5,27**	**5,01**	**-0,90**

*Keterangan : * sementara ** sangat sementara*

https://ponorogokab.bps.go.id

3.2 PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumahtangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kabupaten Ponorogo untuk periode 2016 – 2020.

3.2.1. Konsumsi Akhir Rumahtangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Ponorogo, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumahtangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Ponorogo maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumahtangga.

https://ponorogokab.bps.go.id

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumahtangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumahtangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2016 – 2020 pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 7. Perkembangan Komponen Konsumsi Akhir Rumahtangga Kabupaten Ponorogo 2016 - 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	11.684,83	12.569,84	13.624,05	14.612,76	14.489,73
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	9.022,93	9.419,67	9.851,69	10.304,91	10.164,97
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	71,17	71,05	71,05	71,34	71,64
Rata-rata konsumsi per-Rumah Tangga/tahun (Ribu Rp)					
a. ADHB	47.542,78	51.080,08	55.312,62	59.259,34	58.696,86
b. ADHK 2010	36.712,17	38.278,74	39.997,10	41.789,65	41.177,56
Rata-rata konsumsi per-Kapita/tahun (Ribu Rp)					
a. ADHB	13.449,17	14.449,85	15.647,15	16.769,87	16.620,00
b. ADHK 2010	10.385,35	10.828,53	11.314,61	11.826,10	11.659,42
Pertumbuhan[7]					
a. Total konsumsi Rumah Tangga	4,33	4,40	4,59	4,60	(1,36)
b. Per Rumah Tangga	4,16	4,27	4,49	0,51	(1,46)
c. Perkapita	4,16	4,27	4,49	4,52	(1,41)
Jumlah Rumah Tangga *(unit)*	245.775	246.081	246.310	246.590	246.857
Jumlah penduduk *(000* orang*)*	868,81	869,89	870,71	871,37	871,82

*Keterangan : * sementara ** sangat sementara*

https://ponorogokab.bps.go.id

Selama periode 2016 – 2020 proporsi pengeluaran konsumsi rumahtangga terhadap total PDRB cenderung fluktuatif, yaitu 71,17 persen (2016); 71,05 persen (2017); 71,05 persen (2018); namun meningkat di tahun 2019 yaitu 71,34 persen dan 71,64 persen pada tahun 2020.

Rata-rata konsumsi per rumah tangga dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2016, setiap rumahtangga di Kabupaten Ponorogo menghabiskan biaya sekitar 47,54 juta rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 51,08 juta rupiah (2017); 55,31 juta rupiah (2018); 59,26 juta rupiah (2019) dan menurun menjadi 58,69 juta rupiah (2020).

[7] *Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)*

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga adh Konstan cenderung fluktuatif dari 4,33 persen (2016); 4,40 persen (2017); 4,59 persen (2018); 4,60 persen (2019) dan kontraksi hingga mencapai 1,36 persen di tahun 2020. Pertumbuhan konsumsi perkapita berjalan selaras dengan pertumbuhan konsumsi total adh Konstan yaitu dari 4,16 persen di tahun 2016 menjadi 4,27 persen (2017); 4,49 persen (2018); 4,51 persen (2019) dan kontraksi di tahun 2020 sebesar 1,46 persen.

Sementara rata-rata konsumsi per rumah tangga PDRB atas dasar harga Konstan 2010 tumbuh pada kisaran 2,41 persen per tahun dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yang mencapai 4,49 persen. Namun di tahun 2020 pertumbuhan konsumsi per rumah tangga mengalami kontraksi sebesar 1,41 persen, disebabkan terjadinya wabah pandemik *Covid-19*. Peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara "riil" jauh lebih tinggi dibandingkan peningkatan jumlah penduduk yang umumnya berada di bawah 0,2 persen. Hal ini mengindikasikan terjadinya perubahan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB.

https://ponorogokab.bps.go.id

Tabel 8. Struktur Komponen Konsumsi Rumahtangga Kabupaten Ponorogo 2016-2020

(Persen)

Kelompok Konsumsi	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	34,48	33,87	33,53	33,26	35,24
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,18	3,18	3,17	3,10	3,08
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	8,47	8,47	8,36	8,26	8,65
d. Kesehatan & Pendidikan	9,13	9,31	9,31	9,24	9,93
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	23,84	24,04	24,34	24,71	20,65
f. Hotel & Restoran	15,47	15,64	15,77	15,97	16,51
g. Lainnya	5,43	5,49	5,51	5,46	5,94
Total Konsumsi	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

*Keterangan : * sementara ** sangat sementara*

Struktur konsumsi akhir rumah tangga Kabupaten Ponorogo dari tahun 2016-2020 didominasi oleh konsumsi bukan makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung menurun dari tahun ke tahun, 34,48 persen (2016); 33,87 persen (2017); 33,53 persen (2018); 33,26 persen (2019) dan Kembali meningkat pada tahun 2020 sebesar 35,24 persen. Sementara untuk kelompok pengeluaran bukan makanan, konsumsi tertinggi ada pada subkomponen transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya yang berada pada kisaran 23 sampai 25 persen dari total konsumi akhir rumah tangga.

Jika dilihat pola proporsi konsumsi di atas, memperlihatkan adanya tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Namun, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan rumah tangga, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

https://ponorogokab.bps.go.id

Tabel 9. Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Ponorogo, 2016—2020[8]

(Persen)

Kelompok Konsumsi	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	2,87	3,00	3,92	3,80	4,10
Bukan Makanan	**5,11**	**5,13**	**4,92**	**5,01**	**-4,09**
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,15	4,15	3,72	3,27	-2,27
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4,97	4,61	3,99	3,86	2,49
d. Kesehatan & Pendidikan	5,09	5,02	4,46	3,82	5,08
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	5,60	5,77	6,12	5,99	-14,00
f. Hotel & Restoran	4,99	4,61	4,33	5,65	0,61
g. Lainnya	4,66	5,05	3,82	3,46	5,94
Total Konsumsi	**4,33**	**4,40**	**4,59**	**4,60**	**-1,36**

*Keterangan : * sementara ** sangat sementara*

[8] *Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK)*

Dilihat dari pertumbuhan "riil" nya, pengeluaran rumah tangga untuk kelompok bukan makanan cenderung fluktuatif meskipun tingkat pertumbuhannya masih lebih tinggi dibandingkan kelompok makanan, dengan nilai masing-masing 5,11 persen (2016); 5,13 persen (2017); 4,92 persen (2018); 5,01 persen (2019) dan kontraksi sebesar 4,09 persen pada tahun 2020. Pertumbuhan "riil" ini menunjukan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini mengindikasikan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

Tingkat perubahan harga secara implisit yang disajikan dalam tabel 10 menunjukkan fluktuasi setiap tahunnya untuk setiap kelompok konsumsi rumah tangga. Rincian peningkatan harga pada kelompok makanan sebesar 4,08 persen (2016); 2,59 persen (2017); 3,25 persen (2018); 2,50 persen (2019) dan 0,91 persen (2020). Sementara itu, laju indeks harga implisit konsumsi bukan makanan berfluktuasi dari 3,98 persen (2016) menjadi 3,28 persen (2017). Kemudian pada tahun berikutnya sebesar 3,83 persen (2018); 2,56 persen (2019) dan 3,08 persen (2020).

Tabel 10. Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Ponorogo, 2016-2020[9]

(Persen)

Kelompok Konsumsi	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	4,08	2,59	3,25	2,50	0,91
Bukan Makanan	**3,98**	**3,28**	**3,83**	**2,56**	**3,08**
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,92	3,23	4,27	1,57	0,80
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	3,17	2,84	2,88	1,97	1,35
d. Kesehatan & Pendidikan	4,28	4,42	3,85	2,53	1,40
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	3,00	2,56	3,44	2,70	-3,63
f. Hotel & Restoran	5,42	3,98	4,72	2,80	1,89
g. Lainnya	5,20	3,58	4,70	2,84	1,81
Total Konsumsi	**4,01**	**3,04**	**3,63**	**2,54**	**0,52**

*Keterangan : * sementara ** sangat sementara*

[9] *Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)*

3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

Peranan konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB menurut pengeluaran sangat kecil dibandingkan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini memperlihatkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya ke depan dapat lebih ditingkatkan lagi dan secara tidak langsung juga mampu meningkatkan nilai PDRB wilayah tersebut. Data berikut menunjukan proporsi lembaga non profit (LNPRT) terhadap PDRB.

Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kabupaten Ponorogo, 2016 – 2020

Kelompok Konsumsi	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB *(Miliar Rp)*	379,95	406,48	446,13	485,28	494,71
b. ADHK (*Miliar Rp)*	277,01	285,38	303,62	323,62	326,11
Proporsi terhadap PDRB *(% ADHB)*	2,31	2,30	2,33	2,37	2,41
Pertumbuhan *(ADHK 2010)*	1,18	3,02	6,39	6,26	0,77

*Keterangan : * sementara ** sangat sementara*

Total pengeluaran konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2016 konsumsi LNPRT atas dasar harga berlaku sebesar 379,95 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya yaitu 406,48 miliar rupiah (2017); 446,13 miliar rupiah (2018); 485,28 miliar rupiah (2019) dan 494,71 miliar rupiah (2020).

Pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNPRT selama kurun waktu 2016-2020 mengalami fluktuasi, berturut-turut adalah 1,18 persen (2016), 3,02 persen (2017), 6,39 persen (2018), 6,26 persen (2019) dan 0,77 persen (2020). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 dan berlanjut di tahun 2019 karena adanya kegiatan pemilihan anggota legislatif (Pileg) baik pusat maupun daerah serta pemilihan presiden (Pilpres) yang berimbas pada pengeluaran yang cukup besar bagi partai politik dan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang merupakan bagian dari LNPRT. Meskipun pelaksanaan kegiatan tersebut berlangsung di tahun 2019, namun persiapan yang dilakukan oleh parpol dan ormas telah dilakukan secara intensif sejak 2018 sehingga memacu pengeluaran konsumsi LNPRT di tahun 2018.

3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

https://ponorogokab.bps.go.id

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2015 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 1.905,23 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya sebesar 1.864,48 miliar rupiah (2016), 1.992,98 miliar rupiah (2017), 2.169,28 miliar rupiah (2018), dan 2.348,22 miliar rupiah (2019). Sementara konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010 mencapai 1.358,25 miliar rupiah (2015); 1.262,24 miliar rupiah (2016); 1.288,89 miliar rupiah (2017); 1.333,40 miliar rupiah (2018); dan 1.391,31 miliar rupiah (2019). Konsumsi atas dasar harga konstan mengindikasikan terjadinya penurunan/peningkatan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Tabel 12. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Ponorogo, 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB *(Miliar Rp)*	1.864,48	1.992,98	2.169,28	2.338,22	2.314,68
b. ADHK 2010 *(Miliar Rp)*	1.262,24	1.288,89	1.333,40	1.390,31	1.339,24
Proporsi terhadap PDRB *(%-ADHB)*	11,36	11,27	11,31	11,46	11,28
Konsumsi Pemerintah per-kapita *(Ribu Rp)*					
a. ADHB	2.146,00	2.291,07	2.491,40	2.683,39	2.654,98
b. ADHK 2010	1.452,84	1.481,66	1.531,41	1.595,54	1.536,13
Konsumsi Pemerintah per-pegawai pemerintah *(Ribu Rp)*					
a. ADHB	177.097,11	195.180,19	227.173,23	250.559,63	257.472,99
b. ADHK 2010	119.893,95	126.225,76	139.637,97	148.982,71	148.969,95
Pertumbuhan[10]					
a. Total konsumsi pemerintah	(7,07)	2,11	3,45	4,34	(3,67)
b. Konsumsi perkapita	(7,22)	1,98	3,36	4,26	(3,72)
c. Konsumsi per-pegawai	5,75	5,28	10,63	6,77	(0,01)
Jumlah Pegawai Pemerintah[11]	10.528	10.211	9.549	9.332	8.990
Jumlah penduduk *(000 org)*	868,81	869,89	870,71	871,37	871, 83

*Keterangan : * sementara ** sangat sementara*

https://ponorogokab.bps.go.id

[10] *Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)*
[11] *Tidak termasuk polisi, militer dan pegawai pusat/provinsi*

Proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB dalam kurun waktu 2016-2020 cenderung fluktuatif, dari 11,36 persen (tahun 2016 menjadi 11,27 persen (tahun 2017). Namun sejak 2018 proporsinya cenderung meningkat menjadi 11,31 persen (2018) dan 11,46 persen (2019) dan kemudian menurun lagi menjadi 11,28 persen di tahun 2020. Meski jumlah pegawai negeri sipil semakin berkurang, namun pengeluaran belanja barang jasa serta belanja modal pemerintah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Selain itu di tahun 2019 terbit PP 11/2019 Tentang pelaksanaan UU Desa yang salah satunya mengatur tentang penyetaraan gaji perangkat desa dengan ASN golongan II-a. Hal ini berimbas pada meningkatnya konsumsi belanja pegawai dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktek, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita. Pada tahun 2016 konsumsi pemerintah per-kapita atas dasar harga berlaku sebesar 2,15 juta rupiah dan terus meningkat pada tahun-tahun setelah itu, yaitu menjadi 2,29 juta rupiah (2017); 2,49 juta rupiah (2018); 2,68 juta rupiah (2019) dan mencapai 2,65 juta rupiah pada tahun 2020.

https://ponorogokab.bps.go.id

Namun rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita atas dasar harga konstan 2010 menunjukkan kecenderungan yang meningkat pada periode 2016 hingga 2019, namun menurun pada tahun 2020 dikarenakan *re-focusing* anggaran untuk penanganan pandemic *Covid-19*, dengan besaran masing-masing senilai 1,45 juta rupiah (2016); 1,48 juta rupiah (2017); 1,53 juta rupiah (2018); 1,59 juta rupiah (2019) dan 1,54 juta rupiah (2020). Selaras dengan nilai riil pengeluaran konsumsi pemerintah per kapita, laju pertumbuhannya terjadi kontraksi 7,22 persen (2016); kemudian mengalami percepatan 1,98 persen (2017); 3,36 persen (2018); dan 4,26 persen (2019) dan kembali kontraksi di tahun 2020 sebesar 3,67 persen. Selain faktor berkurangnya jumlah pegawai, kebijakan efisiensi anggaran belanja barang, perjalanan dinas serta rapat yang terjadi di tahun 2016 mengakibatkan kontraksi yang cukup tajam pada pertumbuhan komponen konsumsi pemerintah di tahun tersebut.

Di sisi lain, rata-rata konsumsi per pegawai pemerintah menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2016 konsumsi pemerintah per-pegawai pemerintah (data jumlah pegawai tidak termasuk polisi, militer dan pegawai pusat) sebesar 177,10 juta rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya masing-masing 195,18 juta rupiah (2017); 227,17 juta rupiah (2018); 251,63 juta rupiah (2019) dan 257,47 juta rupiah (2020).

Pada tingkat harga konstan 2010, indikator pengeluaran pemerintah menurut pegawai juga menunjukkan peningkatan dari 119,89 juta rupiah (2016) hingga mencapai 148,97 juta rupiah (2020). Pertumbuhan konsumsi pemerintah per pegawai paling cepat terjadi pada tahun 2018, yaitu 10,63 persen. Jumlah pegawai tahun 2018 berkurang cukup tajam hingga 6,48 persen dibanding tahun sebelumnya, namun pengeluaran pemerintah justru meningkat terutama untuk belanja barang/jasa. Pada periode tahun 2016 s.d 2020 jumlah pegawai pemerintah daerah (tidak termasuk polisi, militer, dan pegawai pusat/provinsi) terus berkurang dengan jumlah pada masing-masing tahun sebesar 10.528 orang (2016); 10.211 orang (2017); 9.549 orang (2018); 9.332 orang (2019) dan 8.990 orang (2020).

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara "riil" ini menunjukkan penurunan secara keseluruhan dan rata-rata per penduduk, namun meningkat secara rata-rata per pegawai pemerintah. Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas pengeluaran sumber daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019, dengan rincian untuk total konsumsi pemerintah sebesar 4,34 persen; untuk konsumsi per-kapita 4,26 persen; dan konsumsi per-pegawai sebesar 6,77 persen, sedangkan tahun 2020 mengalami kontraksi.

https://ponorogokab.bps.go.id

3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)[12]. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

[12] *Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor*

PMTB dalam PDRB Pengeluaran dibagi menjadi dua subkomponen, yaitu sub komponen bangunan dan non bangunan. Jika dilihat strukturnya, proporsi PMTB bangunan terhadap total PMTB terus meningkat selama periode 2016 – 2020 yang berada pada kisaran 82 hingga 83 persen. Sebaliknya proporsi sub komponen PMTB non bangunan terhadap total PMTB cenderung menurun pada kisaran 17 ke 16 persen selama periode tahun 2016 – 2020. Perubahan yang terjadi pada komposisi tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing sub komponen PMTB.

Tabel 13. Perkembangan dan Struktur PMTB
Kabupaten Ponorogo, 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB *(Miliar Rp)*	4.488,41	4.972,33	5.422,88	5.850,06	5.580,25
b. ADHK 2010 *(Miliar Rp)*	3.316,36	3.544,74	3.761,10	3.943,50	3.737,42
Proporsi terhadap PDRB *(% - ADHB)*	27,34	28,11	**28,28**	**28,56**	**27,20**
Struktur PMTB [13]					
a. Bangunan					
(Miliar Rp)	3.735,45	4.144,30	4.523,31	4.890,65	4.646,49
(%)	83,22	83,35	83,41	83,58	83,27
b. Non Bangunan					
(Miliar Rp)	752,95	828,03	899,57	959,41	933,76
(%)	16,78	16,65	16,59	16,42	16,73
Total PMTB					
(Miliar Rp)	4.488,41	4.972,33	5.422,88	5.850,06	5.580,25
(%)	*(100,00)*	*(100,00)*	*(100,00)*	*(100,00)*	*(100,00)*
Pertumbuhan[14] (%)					
a. Bangunan	6,99	7,10	6,14	4,78	-5,46
b. Non Bangunan	4,15	5,83	5,92	5,22	-4,06
Total PMTB	6,49	6,89	6,10	4,85	-5,23

*Keterangan : * sementara ** sangat sementara*

https://ponorogokab.bps.go.id

[13] *Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)*
[14] *Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)*

Jika dilihat pertumbuhannya, masing-masing komponen PMTB pertumbuhannya fluktuatif setiap tahunnya. Pertumbuhan sub komponen bangunan mulai 2018 cenderung melambat sementara komponen non bangunan mempunyai pola yang variatif. Pada tahun 2016 pertumbuhan sub komponen bangunan sebesar 6,99 persen, melaju menjadi 7,10 persen pada tahun 2017. Kemudian sedikit melambat pada tahun 2018 dengan pertumbuhan 6,14 persen dan kembali melambat pada tahun 2019 dengan capaian 4,78 persen dan tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 5,46 persen. Sedangkan sub komponen non bangunan tumbuh 4,15 persen pada tahun 2016. Namun kembali tumbuh cepat pada angka 5,83 persen di tahun 2017 dan 5,92 persen di tahun 2018. Sementara pada tahun 2019 melambat menjadi 5,22 persen dan tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 4,06 persen

Secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2016 – 2017 cenderung meningkat dari 6,49 persen (2016) menjadi 6,89 persen (2017), sementara mulai tahun 2018 mulai melambat dengan angka masing-masing 6,10 persen (2018) dan 4,85 persen (2019) dan tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 5,23 persen. Pertumbuhan PMTB tertinggi terjadi pada tahun 2017, hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya pembentukan modal dalam bentuk kontruksi (baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta) serta tumbuh pesatnya PMTB non bangunan seiring dengan berkembangnya ragam kegiatan dunia usaha.

https://ponorogokab.bps.go.id

3.2.5. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk **"persediaan"** berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 14. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Ponorogo, 2016 - 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB *(Miliar Rp)*	11,12	10,79	11,76	12,04	6,30
b. ADHK 2010 *(Miliar Rp)*	7,54	7,27	7,31	7,35	3,83
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	0,07	0,06	0,06	0,06	0,03

*Keterangan : * sementara ** sangat sementara*

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada pada komponen pengeluaran lainnya. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Pada tahun 2016 perubahan inventori atas dasar harga berlaku sebesar 11,12 miliar rupiah, kemudian menurun menjadi 10,79 miliar rupiah 2017; dan meningkat menjadi 11,76 miliar rupiah (2018) dan 12,04 miliar rupiah (2019), kemudian menurun menjadi 6,30 miliar rupiah pada tahun 2020. Bila dilihat menurut harga konstan 2010, pada tahun 2016 perubahan inventori bernilai 7,54 miliar rupiah, tahun 2017 sebesar 7,27 miliar rupiah, tahun 2018 sebesar 7,31 miliar rupiah, tahun 2019 sebesar 7,35 miliar rupiah, dan pada tahun 2020 sebesar 3,83 miliar rupiah.

Sementara itu, proporsi perubahan inventori terhadap total PDRB di Kabupaten Ponorogo cenderung menurun bahkan stabil. Namun nilainya selalu berada pada kisaran tidak lebih dari satu persen terhadap total PDRB. Pada tahun 2015, proporsi perubahan inventori adalah 0,07 persen (2016), menurun menjadi 0,06 persen (2017), dan berada pada angka 0,06 persen selama tahun 2017 hingga 2019, kemudian turun menjadi 0,03 persen pada tahun 2020.

https://ponorogokab.bps.go.id

3.2.6. Net Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Ponorogo, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Di sisi lain aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kabupaten Ponorogo. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangkan nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kabupaten Ponorogo di luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kabupaten Ponorogo terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah kabupaten/kota lain dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri.

Untuk penyajian angka di tingkat kabupaten/kota hanya ditampilkan nilai net ekspor barang dan jasa (komponen ekspor dikurangi dengan komponen impor). Hal ini disebabkan karena keterbatasan data yang tersedia sehingga dalam penghitungannya menggunakan metode tidak langsung dengan memperhatikan keseimbangan antara PDRB sisi pengeluaran dan PDRB sisi lapangan usaha.

Secara total, dalam kurun waktu 2016-2019 nilai net ekspor barang dan jasa semakin besar angka negatifnya. Artinya nilai impor barang dan jasa semakin tinggi dibandingkan dengan nilai ekspor barang dan jasa. Pada tahun 2016 nilai net ekspor barang dan jasa sebesar minus 2.009,60 miliar rupiah yang meningkat menjadi sebesar minus 2.262,00 miliar rupiah pada tahun 2017.

https://ponorogokab.bps.go.id

Selanjutnya pada tahun 2018-2020 nilai net ekspor barang dan jasa masing-masing sebesar minus 2.492,60 miliar rupiah (2018);minus 2.802,48 miliar rupiah (2019) dan 2.372,30 miliar rupiah (2020)

Sejalan dengan nilai net ekspor barang dan jasa atas dasar harga Berlaku, nilai ekspor barang dan jasa atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukan arah perkembangan yang sama, yaitu cenderung semakin dalam angka negatifnya dengan nilai "riil" masing-masing tahun sebesar minus 1.580,43 miliar rupiah (2016); minus 1.612,50 miliar rupiah (2017); minus 1.637,54 miliar rupiah (2018); minus 1.667,90 miliar rupiah (2019) dan minus 1.402,95 miliar rupiah (2020). Bila dilihat komposisinya, pada periode 2016 sampai dengan 2020, proporsi komponen net ekspor barang dan jasa dalam PDRB meningkat dari minus 12,24 persen di tahun 2016 menjadi minus 12,79 persen di tahun 2017; kemudian mulai meningkat menjadi minus 13,04 persen di tahun 2018; minus 13,74 persen pada tahun 2019 dan minus 11,56 persen di tahun 2020.

Tabel 15. Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Ponorogo 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Net Ekspor Barang dan Jasa					
a. ADHB *(Miliar Rp)*	(2.009,60)	(2.262,00)	(2.499,87)	(2.814,62)	(2.372,30)
b. ADHK 2010 *(Miliar Rp)*	(1.580,43)	(1.612,50)	(1.641,88)	(1.672,58)	(1.402,95)
Proporsi terhadap PDRB *(% - ADHB)*	(12,24)	(12,79)	(13,04)	(13,74)	(11,56)

*Keterangan : * sementara ** sangat sementara*

https://ponorogokab.bps.go.id

4 PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN KABUPATEN PONOROGO 2016-2020

https://ponorogokab.bps.go.id

https://ponorogokab.bps.go.id

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kabupaten Ponorogo, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran "produktivitas", karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti penduduk dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB perkapita.

https://ponorogkab.bps.go.id

Tabel 16. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Ponorogo, 2016 - 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB *(Miliar Rp)*					
- ADHB	16.419,19	17.690,42	19.174,23	20.483,75	20.513,38
- ADHK 2010	12.305,65	12.933,45	13.615,23	14.297,10	14.168,62
PDRB perkapita *(Ribu Rp)*					
- ADHB	18.898,39	20.336,29	22.021,49	23.507,52	23.529,24
- ADHK 2010	14.163,74	14.867,85	15.637,02	16.407,61	16.251,68
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	5,11	4,97	5,17	4,93	(0,95)
Jumlah penduduk *(000 org)*	868,81	869,89	870,71	871,37	871,82
Pertumbuhan (%)	0,16	0,12	0,09	0,08	0,05

*Keterangan : * sementara ** sangat sementara*

Tabel 17 menunjukkan peningkatan PDRB per-kapita Kabupaten Ponorogo dari tahun ke tahun yang seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Sementara itu pertumbuhan PDRB per-kapita secara "riil" tahun 2016-2019 juga selalu meningkat di kisaran 4-5 persen, namun di tahun 2020 terkontraksi sebesar 0,95 persen karena pandemik *Covid-19*. Di sisi lain penambahan jumlah penduduk meningkat rata-rata pada kisaran 0,1 – 0,2 persen setiap tahunnya. Dengan demikian maka pertumbuhan per-kapita tersebut tidak saja terjadi secara "riil" tetapi juga terjadi secara kualitas.

4.2 PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

https://ponorogokab.bps.go.id

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 17. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Ponorogo, 2016 - 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) *(Miliar Rp)*					
a. Rumah tangga	11.684,83	12.569,84	13.624,05	14.612,76	14.489,73
b. LNPRT	379,95	406,48	446,13	485,28	494,71
c. Pemerintah	1.864,48	1.992,98	2.169,28	2.338,22	2.314,68
J u m l a h	13.929,26	14.969,30	16.239,45	17.436,26	17.299,12
PDRB (ADHB) *(Miliar Rp)*	16.419,19	17.690,42	19.174,23	20.483,75	20.513,38
Proporsi (%)	84,84	84,62	84,69	85,12	84,33

*Keterangan : * sementara ** sangat sementara*

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (lebih dari 80 persen). Meskipun konsumsi akhir makin meningkat setiap tahunnya, namun proporsinya terhadap PDRB berfluktuatif. Tahun 2016 proporsi konsumsi akhir mencapai 84,84 persen, menurun menjadi 84,62 persen (2017). Selanjutnya tahun 2018 proporsinya mulai meningkat kembali yaitu 84,69 persen dan 85,12 persen pada tahun 2019. Kemudian tahun 2020 kembali menurun menjadi 84,33 persen. Dalam hal ini, produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB atau eskpor) memiliki peran yang relatif kecil.

4.3 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t
Y_t = Output tahun ke t
Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

https://ponorogokab.bps.go.id

Tabel 18. *Incremental Capital Output Ratio* Kabupaten Ponorogo 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
PDRB (ADHK 2010) *(Miliar rupiah)*	12.305,65	12.933,45	13.615,23	14.297,10	14.168,62
Perubahan *(Miliar rupiah)*	617,79	627,80	681,78	681,87	-128,48
PMTB (ADHK 2010) *(Miliar Rp)*	3.316,36	3.544,74	3.761,10	3.943,50	3.737,42
ICOR	5,37	5,65	5,52	5,78	-29,09

*Keterangan : * sementara ** sangat sementara*

Data pada tabel 19 menunjukkan besaran ICOR cenderung fluktuatif pada kurun waktu 2016-2020 yaitu dari sebesar 5,37 (2016) menjadi 5,65 (2017). Sementara pada tahun 2018 menurun menjadi 5,48 dan meningkat kembali pada tahun 2019 menjadi 5,78, kemudian di tahun 2020 menjadi -29,09. Salah satu penyebab mengapa terjadi penurunan output di tahun 2020 adalah ada sebagian barang modal dijual, rusak, atau tidak diaktifkan karena alasan tertentu. Walaupun mungkin ada penambahan barang modal baru, akan tetapi barang modal baru itu sementara belum berproduksi atau sudah berproduksi tetapi output yang dihasilkan belum sesuai dengan besarnya kapasitas produksi yang sebenarnya, sehingga selisih output antara tahun pada saat ditanamkan investasi dengan tahun sebelumnya bernilai negatif. Hal ini dikarenakan adanya pandemik *Covid-19* yang terjadi selama tahun 2020.

https://ponorogokabbps.go.id

5 PENUTUP

https://ponorogokab.bps.go.id

https://ponorogokab.bps.go.id

1. PDRB menurut pengeluaran tiap tahunnya dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Ponorogo pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.

2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.

3. Data disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2016 sampai dengan 2020, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.

4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana (NAD).

5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Ponorogo terhadap ekonomi luar daerah.

https://ponorogokab.bps.go.id

https://ponorogokab.bps.go.id

LAMPIRAN

https://ponorogokab.bps.go.id

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020

(Miliar Rp.)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
1. Konsumsi Rumah Tangga	**11.684,83**	**12.569,84**	**13.624,05**	**14.612,76**	**14.489,73**
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	4.029,31	4.257,75	4.568,50	4.860,30	5.105,58
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	371,31	399,19	431,74	452,81	446,1
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	990,06	1.065,16	1.139,58	1.206,98	1.253,71
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	1.066,58	1.169,68	1.268,88	1.350,62	1.439,16
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	2.785,33	3.021,27	3.316,62	3.610,22	2.992,01
1.f. Hotel dan Restoran	1.807,84	1.966,50	2.148,41	2.333,49	2.392,07
1.g. Lainnya	634,4	690,28	750,33	798,34	861,1
2. Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga	**379,95**	**406,48**	**446,13**	**485,28**	**494,71**
3. Konsumsi Pemerintah	**1.864,48**	**1.992,98**	**2.169,28**	**2.338,22**	**2.314,68**
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	**4.488,41**	**4.972,33**	**5.422,88**	**5.850,06**	**5.580,25**
4.a. Bangunan	3.735,45	4.144,30	4.523,31	4.890,65	4.646,49
4.b. Non-Bangunan	752,95	828,03	899,57	959,41	933,76
5. Perubahan Inventori	**11,12**	**10,79**	**11,76**	**12,04**	**6,3**
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	**(2.009,60)**	**(2.262,00)**	**(2.499,87)**	**(2.814,62)**	**(2.372,30)**
PDRB (1+2+3+4+5+6-7)	**16.419,19**	**17.690,42**	**19.174,23**	**20.483,75**	**20.513,38**

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

https://ponorogokab.bps.go.id

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020

(Miliar Rp.)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
1. Konsumsi Rumah Tangga	**9.022,93**	**9.419,67**	**9.851,69**	**10.304,91**	**10.164,97**
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	3.092,53	3.185,31	3.310,32	3.435,98	3.576,87
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	296,13	308,41	319,88	330,33	322,83
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	825,74	863,84	898,34	933,06	956,26
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	761,58	799,84	835,51	867,43	911,51
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	2.296,13	2.428,57	2.577,27	2.731,58	2.349,02
1.f. Hotel dan Restoran	1.256,78	1.314,69	1.371,56	1.449,08	1.457,90
1.g. Lainnya	494,04	519,00	538,80	557,44	590,58
2. Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga	**277,01**	**285,38**	**303,62**	**323,62**	**326,11**
3. Konsumsi Pemerintah	**1.262,24**	**1.288,89**	**1.333,40**	**1.390,31**	**1.339,24**
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	**3.316,36**	**3.544,74**	**3.761,10**	**3.943,50**	**3.737,42**
4.a. Bangunan	2.748,22	2.943,48	3.124,27	3.273,45	3.094,61
4.b. Non-Bangunan	568,14	601,26	636,83	670,05	642,81
5. Perubahan Inventori	**7,54**	**7,27**	**7,31**	**7,35**	**3,83**
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	**(1.580,43)**	**(1.612,50)**	**(1.641,88)**	**(1.672,58)**	**(1.402,95)**
PDRB (1+2+3+4+5+6-7)	**12.305,65**	**12.933,45**	**13.615,23**	**14.297,10**	**14.168,62**

* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara

https://ponorogokab.bps.go.id

Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
1. Konsumsi Rumah Tangga	**71,17**	**71,05**	**71,05**	**71,34**	**70,64**
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	24,54	24,07	23,83	23,73	24,89
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,26	2,26	2,25	2,21	2,17
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6,03	6,02	5,94	5,89	6,11
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	6,50	6,61	6,62	6,59	7,02
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	16,96	17,08	17,30	17,62	14,59
1.f. Hotel dan Restoran	11,01	11,12	11,20	11,39	11,66
1.g. Lainnya	3,86	3,90	3,91	3,90	4,20
2. Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga	**2,31**	**2,30**	**2,33**	**2,37**	**2,41**
3. Konsumsi Pemerintah	**11,36**	**11,27**	**11,31**	**11,42**	**11,28**
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	**27,34**	**28,11**	**28,28**	**28,56**	**27,20**
4.a. Bangunan	22,75	23,43	23,59	23,88	22,65
4.b. Non-Bangunan	4,59	4,68	4,69	4,68	4,55
5. Perubahan Inventori	**0,07**	**0,06**	**0,06**	**0,06**	**0,03**
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	**(12,24)**	**(12,79)**	**(13,04)**	**(13,74)**	**(11,56)**
PDRB (1+2+3+4+5+6-7)	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara

https://ponorogokab.bps.go.id

Tabel 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
1. Konsumsi Rumah Tangga	**4,33**	**4,40**	**4,59**	**4,60**	**(1,36)**
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	2,87	3,00	3,92	3,80	4,10
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	3,15	4,15	3,72	3,27	(2,27)
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4,97	4,61	3,99	3,86	2,49
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	5,09	5,02	4,46	3,82	5,08
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	5,60	5,77	6,12	5,99	(14,00)
1.f. Hotel dan Restoran	4,99	4,61	4,33	5,65	0,61
1.g. Lainnya	4,66	5,05	3,82	3,46	5,94
2. Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga	**1,18**	**3,02**	**6,39**	**6,59**	**0,77**
3. Konsumsi Pemerintah	**(7,07)**	**2,11**	**3,45**	**4,27**	**(3,67)**
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	**6,49**	**6,89**	**6,10**	**4,85**	**(5,23)**
4.a. Bangunan	6,99	7,10	6,14	4,78	(5,46)
4.b. Non-Bangunan	4,15	5,83	5,92	5,22	(4,06)
5. Perubahan Inventori	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
PDRB (1+2+3+4+5+6-7)	**5,29**	**5,10**	**5,27**	**5,01**	**(0,90)**

* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara

https://ponorogokab.bps.go.id

Tabel 5. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
1. Konsumsi Rumah Tangga	**129,50**	**133,44**	**138,29**	**141,80**	**142,55**
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	130,29	133,67	138,01	141,45	142,74
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	125,39	129,44	134,97	137,08	138,18
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	119,90	123,30	126,85	129,36	131,11
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	140,05	146,24	151,87	155,70	157,89
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	121,31	124,41	128,69	132,17	127,37
1.f. Hotel dan Restoran	143,85	149,58	156,64	161,03	164,08
1.g. Lainnya	128,41	133,00	139,26	143,21	145,81
2. Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga	**137,16**	**142,43**	**146,93**	**149,95**	**151,70**
3. Konsumsi Pemerintah	**147,71**	**154,63**	**162,69**	**168,18**	**172,84**
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	**135,34**	**140,27**	**144,18**	**148,35**	**149,31**
4.a. Bangunan	135,92	140,80	144,78	149,40	150,15
4.b. Non-Bangunan	132,53	137,72	141,26	143,19	145,26
5. Perubahan Inventori	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
PDRB (1+2+3+4+5+6-7)	**133,43**	**136,78**	**140,83**	**143,27**	**144,78**

* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara

https://ponorogokab.bps.go.id

Tabel 6. Perubahan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
1. Konsumsi Rumah Tangga	**4,01**	**3,04**	**3,63**	**2,54**	**0,52**
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	4,08	2,59	3,25	2,50	0,91
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	3,92	3,23	4,27	1,57	0,80
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	3,17	2,84	2,88	1,97	1,35
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,28	4,42	3,85	2,53	1,40
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	3,00	2,56	3,44	2,70	(3,63)
1.f. Hotel dan Restoran	5,42	3,98	4,72	2,80	1,89
1.g. Lainnya	5,20	3,58	4,70	2,84	1,81
2. Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga	**3,70**	**3,84**	**3,16**	**2,06**	**1,17**
3. Konsumsi Pemerintah	**5,30**	**4,68**	**5,21**	**3,38**	**2,77**
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	**5,46**	**3,64**	**2,79**	**2,89**	**0,65**
4.a. Bangunan	6,01	3,59	2,83	3,19	0,50
4.b. Non-Bangunan	2,87	3,91	2,57	1,36	1,45
5. Perubahan Inventori	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
PDRB (1+2+3+4+5+6-7)	**4,55**	**2,51**	**2,96**	**1,73**	**1,05**

* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara

https://ponorogokab.bps.go.id

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

https://ponorogokab.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PONOROGO
Jl. Letjend R. Suprapto No. 14 Ponorogo
Telp/Fax : 0352-481026 Email : bps3502@bps.go.id
Homepage : https://ponorogokab.bps.go.id